



# JURNAL RISET AKUNTANSI

Volume IV/No.1/April 2012

ISSN : 2086-0447

PENGARUH KOMITMEN MANAJEMEN TERHADAP IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (SIDJP) DENGAN PENDEKATAN *BUSINESS INTELLIGENCE SYSTEM* (BIS)  
(SURVEY PADA KPP PRATAMA DI WILAYAH KOTA BANDUNG)

**Alfin Ferdiansyah**

**Dadan Kusumawardana**

PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN TINGKAT SUKU BUNGA BI TERHADAP PENDAPATAN MARGIN MURABAHAH PADA PT BANK SYARIAH MANDIRI

**Astri Arumdhani**

**Rini Septiani**

PENGARUH PENERAPAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN TERHADAP *ADMINISTRATIVE COST*

**Devi**

**Ipung Priambodo**

PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN FORMAL WAJIB PAJAK  
(SURVEY WP OP PADA KPP PRATAMA MAJALAYA)

**Egi Andika**

**Ely Suhayati**

**Yohanes Jehadu**

ANALISIS TINGKAT SUKU BUNGA DEPOSITO BANK KONVENSIONAL PENGARUHNYA TERHADAP TINGKAT BAGI HASIL DAN IMPLIKASINYA PADA PENGHIMPUNAN DEPOSITO *MUDHARABAH* PADA BANK SYARIAH MANDIRI

**Rima Rismayanti**

**Wahyu Widodo**

PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN DAN PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA  
(SURVEY PADA DPRD KOTA BANDUNG)

**Sherillia Septiriane**

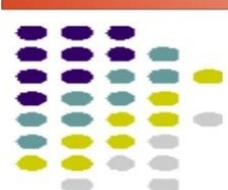
**Yon Nusdal**

PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI

**UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA**

JL.Dipatiukur 112-114 Bandung 40132 Telp.022-2504119, Fax. 022-2533754

Email : ak@unikom.ac.id



## **Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap *Administrative Costs***

Oleh:  
DEVI  
IPUNG PRIAMBODO

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIKOM**

### **ABSTRAK**

*Konsep modernisasi administrasi adalah pelayanan prima dan pengawasan intensif dengan pelaksanaan good governance. Tujuannya, meningkatkan kepatuhan pajak juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan, serta meningkatkan produktivitas kinerja pegawai pajak. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung, merupakan lembaga yang bergerak di bidang perpajakan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap administrative costs pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif. Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap administrative costs digunakan pengujian statistik. Pengujian statistik yang digunakan adalah perhitungan regresi linier sederhana, korelasi Pearson, koefisien determinasi, uji hipotesis dengan menggunakan aplikasi SPSS 15.0 for windows. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan modern sudah baik dan administrative costs dapat berkurang pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung. Terdapat hubungan yang kuat atau signifikan antara penerapan sistem administrasi perpajakan modern dengan administrative costs pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung yaitu dengan diketahui  $H_0$  ada pada daerah penolakan berarti  $H_a$  diterima atau penerapan sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh mengurangi administrative costs pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung.*

### **1. Pendahuluan**

#### **1.1 Latar Belakang**

Administrasi Perpajakan hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak. Kondisi administrasi perpajakan di Indonesia sebelum adanya Sistem Administrasi Perpajakan Modern adalah akses atau perolehan informasi perpajakan dan ketentuannya yang terkadang dirasakan sulit, sehingga kondisi ini membuat tingkat pemahaman masyarakat mengenai perpajakan menjadi kurang atau bahkan tidak tahu sama sekali. Sistem informasi yang diterapkan cenderung terbatas kepada kebutuhan pelaporan.

Tugas mulia administrasi perpajakan, terutama administrasi pajak pusat, diemban oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai salah satu instansi pemerintah yang secara struktural berada di bawah Departemen Keuangan. Dengan visi menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak menetapkan salah satu misinya, yaitu misi fiskal, adalah untuk menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi.

*Good Governance* ditandai dengan teknologi informasi dan pelayanan prima Direktorat Jenderal Pajak. *Good Governance* merupakan penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini. Sistem informasi yang merupakan bagian dari pelaksanaan sistem administrasi perpajakan yang disusun seefektif mungkin sehingga dapat mengurangi biaya administrasi.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan beberapa masalah yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan sistem administrasi perpajakan modern pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung.
2. Bagaimana tingkat administrative costs yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung.
3. Seberapa besar pengaruh pelaksanaan sistem administrasi perpajakan modern terhadap tingkat administrative cost pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung.

## **2. Kajian Pustaka Dan Kerangka Pemikiran**

### **2.1 Kajian Pustaka**

#### **2.1.1 Sistem Administrasi Perpajakan Modern**

Menurut Marcus Taufan Sofyan (2005:53) sistem administrasi perpajakan modern adalah penerapan sistem administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerjanya, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat yang merupakan perwujudan dari program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan jangka menengah yang menjadi prioritas reformasi perpajakan yang digulirkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2001.

Sedangkan menurut Suparman (2007:1) sistem administrasi perpajakan modern adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi baik secara individu, kelompok maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat.

Modernisasi administrasi perpajakan yang dilakukan pada dasarnya meliputi:

1. Restrukturisasi organisasi;
2. Penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi;
3. Penyempurnaan manajemen sumber daya manusia;
4. Pelaksanaan *Good Governance*.

#### **2.1.2 Administrative Costs**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2009:151) administrative costs adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh sector publik dalam hal ini pemerintah suatu negara, terutama terkait dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh lembaga yang mengadministrasikan pajak atau tax bureau yang di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak. Meliputi biaya untuk pengembangan sistem informasi, biaya gaji pegawai, dan biaya pengembangan sistem komputerisasi.

*Administrative costs* yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak digunakan untuk mengembangkan sistem administrasi perpajakan modern yang sudah diterapkan agar menjadi lebih baik. Biaya-biaya yang dikeluarkan tersebut diantaranya:

1. Biaya untuk pengembangan sistem informasi;
2. Biaya gaji pegawai;

3. Biaya pengembangan sistem komputerisasi;
4. Biaya operasional.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Perubahan sistem administrasi pajak dalam hal pengelolaan sangat penting dan konstruktif untuk memenuhi tuntutan berbagai pihak sebagai pemangku kepentingan terhadap pajak. Modernisasi perpajakan yang dilakukan merupakan bagian dari reformasi perpajakan secara komprehensif sebagai satu kesatuan dilakukan terhadap 3 bidang pokok yang secara langsung menyentuh pilar perpajakan yaitu bidang administrasi, bidang peraturan, dan bidang pengawasan.

Melalui modernisasi administrasi perpajakan, diharapkan terbangun pilar-pilar pengelolaan pajak yang kokoh sebagai fundamental penerimaan negara yang baik dan berkesinambungan. Modernisasi sistem perpajakan di lingkungan perpajakan Direktorat Jenderal Pajak bertujuan untuk menerapkan *Good Governance* dan pelayanan prima kepada masyarakat. *Good Governance* merupakan penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem teknologi yang handal dan terkini. Strategi yang ditempuh adalah pemberian pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif kepada para wajib pajak. Selain itu untuk mencapai tingkat kepatuhan pajak yang tinggi, meningkatkan kepercayaan administrasi perpajakan dan mencapai tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi. Pengelolaan pajak mengalami perubahan besar yang terus dikembangkan ke arah modernisasi. Dengan demikian optimalisasi penerimaan pajak dapat terlaksana dengan baik, efektif, dan efisien.

Modernisasi perpajakan yang dilakukan pemerintah tentunya tidaklah hanya untuk mencapai target penerimaan pajak semata, juga penting dilakukan untuk menuju adanya perubahan paradigma perpajakan. Dimana ketentuan, prosedur, dan aktivitas perpajakan juga terus diarahkan untuk peningkatan pelayanan agar menjadi *business friendly* bagi masyarakat. Hal ini akan mengakibatkan masyarakat dapat memandang pajak menjadi suatu kewajiban partisipatif warga dan tidak dianggap sebagai beban kuantitatif.

*Administrative costs* yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak digunakan untuk mengembangkan sistem administrasi perpajakan modern yang sudah diterapkan

agar menjadi lebih baik. Biaya-biaya yang dikeluarkan tersebut diantaranya biaya untuk pengembangan sistem informasi, biaya gaji pegawai, biaya pengembangan sistem komputerisasi dan biaya operasional.

### 3. Metodologi Penelitian

#### 3.1 Metode Penelitian

Untuk menguji hipotesis peneliti dapat memilih metode penelitian yang sesuai, pertimbangan ideal untuk memilih metode itu adalah tingkat ketelitian data yang diharapkan dan konsisten yang dikehendaki. Sedangkan pertimbangan praktis adalah tersedianya dana, waktu, dan kemudahan yang lain. Pada penelitian kuantitatif ini metode penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif dan verifikatif.

#### 3.2 Operasionalisasi Variabel

Untuk meneliti bagaimana pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap administrative costs, penulis menentukan operasionalisasi variabel sebagai berikut:

1. Variable Independent adalah penerapan sistem administrasi perpajakan modern.
2. Variable Dependent adalah administrative costs.

**Tabel 3.2**  
**Operasional Variabel**

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern ( <i>independent</i> )	Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern merupakan bagian dari <i>good governance</i> yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini. (Siti Kurnia Rahayu, 2009:95)	1. Restrukturisasi organisasi. 2. Penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi. 3. Penyempurnaan manajemen sumber daya manusia. 4. Pelaksanaan <i>Good Governance</i> ( Siti Kurnia Rahayu, 2009:110)	Ordinal

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
<i>Administrative Costs (dependent)</i>	<i>Administrative Costs</i> adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh sektor publik dalam hal ini pemerintah suatu Negara, terutama terkait dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh lembaga yang mengadministrasikan pajak atau <i>tax bureau</i> yang di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak. (Siti Kurnia Rahayu 2009:151)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biaya untuk pengadaan sistem informasi.</li> <li>2. Biaya gaji pegawai.</li> <li>3. Biaya pengembangan sistem komputerisasi.</li> <li>4. Biaya Operasional.</li> </ol> ( Siti Kurnia Rahayu, 2009:151)	Rasio

### 3.3 Populasi dan Penarikan Sampel

#### 3.3.1 Populasi

Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung.

#### 3.3.2 Sampel

Karena pada penelitian ini jumlah Kantor Pelayanan Pajak yang ada di wilayah Kota Bandung hanya ada 5 Kantor Pelayanan Pajak maka semuanya diteliti atau menggunakan sensus.

### 3.4 Teknik Penentuan Data

#### 3.4.1 Uji Validitas

Pengujian ini dilakukan untuk menguji kesahihan setiap item pernyataan dalam mengukur variabelnya. Pengujian validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor masing-masing pertanyaan item yang ditujukan ke pada responden dengan total skor untuk seluruh item. Teknik korelasi yang digunakan untuk menguji validitas butir pernyataan dalam penelitian ini adalah korelasi product moment.

#### 3.4.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten, apabila pengukuran diulang dua kali atau lebih. Jadi, dengan kata lain reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau diandalkan.

### 3.5 Rancangan Analisis dan Pengujian Hipotesis

#### 3.5.1 Rancangan Analisis

##### 1. Analisis Kualitatif

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap indikator yang dinilai oleh responden, diklasifikasikan dalam lima alternatif jawaban dengan menggunakan skala ordinal yang menggambarkan peringkat jawaban.
- 2) Dihitung total skor setiap variabel/subvariabel = jumlah skor dari seluruh indikator variabel untuk semua responden.
- 3) Dihitung skor setiap variabel/subvariabel = rata-rata dari total skor.
- 4) Untuk mendeskripsikan jawaban responden, juga digunakan statistik deskriptif seperti distribusi frekuensi dan tampilan dalam bentuk tabel ataupun grafik.
- 5) Untuk menjawab deskripsi tentang masing-masing variabel penelitian ini, digunakan rentang kriteria penilaian sebagai berikut:

$$RS = \frac{N(m-1)}{m}$$

Keterangan :

n = jumlah sampel yang diambil (dalam penelitian ini ada 50)

m = jumlah alternatif jawaban tiap *item* (5 alternatif)

##### 2. Analisis Kuantitatif

Metode kuantitatif adalah metode pengolahan data berbentuk angka.

###### a. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier sederhana adalah alat analisis yang digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independent (X) terhadap variabel dependent (Y). Dampak dari analisis regresi dapat digunakan untuk memutuskan apakah naik dan menurunnya variabel dependent (administrative costs) dapat dilakukan melalui menaikkan dan menurunkan keadaan variabel independent (penerapan sistem administrasi perpajakan modern). Atau dengan meningkatkan keadaan variabel dependent (administrative cost) dapat dilakukan dengan meningkatkan variabel independent (penerapan sistem administrasi perpajakan modern). Dengan formulasi sebagai berikut:

$$Y = a + b X$$

Sumber: Jonathan, 2005:73

Dimana nilai a dan b dicari terlebih dahulu dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$a = \frac{(\sum X^2)(\sum Y) - (\sum X)(\sum XY)}{n\sum X^2 - (\sum X)^2}$$

Sumber: Jonathan, 2005:73

$$b = \frac{n\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{n\sum X^2 - (\sum X)^2}$$

Sumber: Jonathan, 2005:73

Keterangan:

a = konstanta (nilai Y pada saat nol)

b = koefisien regresi

X = nilai variabel *independent*

Y = nilai variabel *dependent*

#### A. Analisis Korelasi Pearson

Koefisien korelasi pearson digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya hubungan linier antara variabel independent (X) dan variabel dependent (Y) serta mempunyai tujuan untuk meyakinkan bahwa pada kenyataannya terdapat hubungan antara pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern dengan administrative costs. Dengan formulasi sebagai berikut :

$$r = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n(\sum X^2) - (\sum X)^2\} \{n(\sum Y^2) - (\sum Y)^2\}}}$$

Sumber: Sugiyono, 2009:274

Keterangan :

r = Koefisien Korelasi

n = Jumlah Tahun Yang di Hitung

X = Variabel Bebas (Independent)

Y = Variabel Terikat (Dependent)

#### B. Koefisien Determinasi

Dalam analisis korelasi terdapat suatu angka yang disebut dengan koefisien determinasi yang sering disebut koefisien penentu, karena besarnya adalah kuadrat dari koefisien korelasi (r ). Sehingga koefisien ini berguna untuk mengetahui besarnya kontribusi pengaruh penerapan sistem administrasi

perpajakan modern terhadap administrative costs, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$Kd = (r)^2 \times 100 \%$$

Sumber: Jonathan, 2005:72

Keterangan:

Kd = Koefisien Determinasi

r = Koefisien Korelasi

### 3.5.2 Pengujian Hipotesis

#### 1. Hipotesis Penelitian

Hipotesis sebagai jawaban sementara yang harus diuji dan dibuktikan kebenarannya, maka untuk memperoleh jawaban yang benar dari hipotesis penulis yang telah disebut pada kerangka penelitian akan diuji apakah terdapat pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern sebagai variabel *independent* terhadap *administrative costs* sebagai variabel *dependent*.

Ho : Tidak terdapat pengaruh antara penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap *administrative costs*.

Ha : Terdapat pengaruh antara penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap *administrative costs*.

#### 2. Hipotesis Statistik

Berdasarkan pada alat statistik yang digunakan dan hipotesis penelitian di atas maka penulis menetapkan dua hipotesis yang digunakan untuk uji statistiknya yaitu hipotesis nol ( $H_0$ ) yang diformulasikan untuk ditolak dan hipotesis alternatif ( $H_1$ ) yaitu hipotesis penulis yang diformulasikan untuk diterima, dengan perumusan sebagai berikut:

- Ho:  $\beta = 0$  Penerapan sistem administrasi perpajakan modern (*independent* (X)) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *administrative costs* (*dependent* (Y)) Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung.
- Ha:  $\beta \neq 0$  Penerapan sistem administrasi perpajakan modern (*independent* (X)) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *administrative costs* (*dependent* (Y)) Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung.

#### a. Uji Statistik

Untuk menguji signifikansi suatu koefisien Korelasi, maka dapat menggunakan statistik uji t student dengan rumus sebagai berikut :

$$t_{hitung} = r_{xy} \times \sqrt{\frac{n-2}{1-(r_{xy})^2}}$$

Sugiyono, 2009:184

Keterangan:

t : nilai uji t

r : koefisien Korelasi

n : jumlah sampel

### b. Menguji tingkat signifikansi

Agar hasil perhitungan koefisien korelasi dapat diketahui signifikan/tidak signifikan maka hasil perhitungan dari statistik uji t ( $t_{hitung}$ ) tersebut selanjutnya dibandingkan dengan  $t_{tabel}$ . Tingkat signifikannya yaitu  $\alpha = 0,05$  dengan uji dua pihak dan derajat kebebasannya ( $dk = n-2$ ), artinya jika hipotesis nol ditolak dengan taraf kepercayaan 95%, maka kemungkinan bahwa hasil dari penarikan kesimpulan mempunyai kebenaran 95% dan hal ini menunjukkan adanya hubungan (korelasi) yang meyakinkan (signifikan) antara dua variabel tersebut.

### c. Kriteria Penarikan Pengujian

Jika menggunakan tingkat signifikansi ( $\alpha = 0,05$ ) untuk diuji dua pihak, maka kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis yaitu sebagai berikut:

- Jika  $t_{hitung} \geq t_{tabel}$  maka  $H_0$  ada di daerah penolakan, berarti  $H_a$  diterima artinya antara variabel independent (X) dan variabel dependent (Y) ada hubungannya.
- Jika  $t_{hitung} \leq t_{tabel}$  maka  $H_0$  ada di daerah penerimaan, berarti  $H_a$  ditolak artinya antara variabel independent (X) dan variabel dependent (Y) tidak ada hubungannya.



**Gambar 3.1**  
Uji Daerah Penerimaan dan Penolakan Hipotesis

#### **d. Pengujian Asumsi Klasik**

Setelah hasil regresi diperoleh dan selanjutnya dilakukan pengujian asumsi klasik untuk mengevaluasi kelayakan hasil regresi, yaitu:

##### **1) Uji Normalitas**

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah distribusi variabel terikat untuk setiap nilai variabel bebas tertentu berdistribusi normal atau tidak.

Menurut Singgih Santoso (2002:393) dasar pengambilan keputusan bisa dilakukan berdasarkan probabilitas (Asymtotic Significance), yaitu:

- Jika probabilitas  $> 0,05$  maka distribusi dari model adalah normal.
- Jika probabilitas  $< 0,05$  maka model tidak berdistribusi secara normal

##### **2) Uji Heteroskedastisitas**

Situasi heteroskedastis akan menyebabkan penaksiran koefisien-koefisien regresi menjadi tidak efisien dan hasil taksiran dapat menjadi kurang atau melebihi dari yang semestinya. Dengan demikian, agar koefisien-koefisien regresi tidak menyesatkan, maka situasi heteroskedastis tersebut harus dihilangkan dari model regresi. Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas digunakan uji-rank Spearman Gujarati “Dengan mengkorelasikan variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual (error). Jika nilai koefisien korelasi antara variabel bebas dengan nilai absolut dari residual(error) signifikan, maka kesimpulannya terdapat heteroskedastisitas (varian dari residual tidak homogen)”.

#### **e. Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil pengolahan data dan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan berdasarkan pada hasil kriteria yang telah dijelaskan di atas, juga dari teori-teori yang mendukung objek dari masalah yang diteliti.

## **4. Hasil Penelitian**

### **4.1 Hasil Penelitian Analisis Deskriptif**

#### **A. Sistem Modernisasi Perpajakan**

Pada variabel penerapan sistem admimistrasi perpajakan modern dapat dilihat secara keseluruhan penerapan sistem admimistrasi perpajakan modern pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang ada di wilayah Kota Bandung sudah termasuk baik.

Bila dilihat berdasarkan Kantor Pelayanan Pajak, penerapan sistem administrasi perpajakan modern pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees merupakan yang paling baik, yaitu masuk kategori sangat baik. Sebaliknya penerapan administrasi perpajakan modern pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cicadas merupakan yang paling buruk meskipun masih termasuk dalam kategori baik. Melalui gambaran data dari keempat indikator maka dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan modern pada kantor pelayanan pajak yang ada di wilayah Kota Bandung sudah termasuk baik.

### B. *Administrative Costs*

Secara rata-rata *Administrative costs* yang dikeluarkan masing-masing Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang ada di wilayah Kota Bandung sebesar Rp 94,581 untuk setiap wajib pajak.

**Tabel 4.9**  
***Administrative Costs* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah kota Bandung**

No	KPP	Biaya Administrasi	Jumlah WP	Biaya/WP
1	KPP Tegallega	5,943,686,000	53945	110,180
2	KPP Bojongara	6,456,682,000	59516	108,486
3	KPP Cibeunying	6,208,022,000	56723	109,445
4	KPP Cicadas	6,270,120,000	55556	112,861
5	KPP Karees	5,441,726,000	94835	57,381
	<b>Rata-Rata</b>	<b>6,064,047,200</b>	<b>64115</b>	<b>94,581</b>

*Administrative costs* tertinggi dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas yaitu sebesar Rp 112,861 per setiap wajib pajak. Sebaliknya *Administrative costs* paling rendah dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees yaitu sebesar Rp 57,381 untuk setiap wajib pajak.

#### 4.1.1 Analisis Kuantitatif Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap *Administrative Costs*

##### 1) Analisis Regresi

Untuk menguji pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern (*independent* (X)) terhadap *administrative costs* (*dependent* (Y)) pada Kantor

Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung digunakan analisis regresi linier sederhana. Dengan menggunakan *software SPSS 15 for windows*, maka dapat dilihat hasil pengolahan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.11**  
**Hasil Analisis Regresi**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	241777.1	42958.199	5.628	.011
	Modernisasi	-43224.7	12953.652	-.888	.044

a. Dependent Variable: Administrative Cost

Dari tabel di atas maka didapatkan suatu persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 241777,1 - 43224,7 X$$

Dimana :        Y = *Administrative cost*  
                  X = Penerapan sistem administrasi perpajakan modern

koefisien regresi memiliki tanda negatif, artinya semakin baik penerapan sistem administrasi perpajakan modern akan menurunkan *administrative costs* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung.

## 2) Analisis Korelasi

Hubungan antar variabel penerapan sistem administrasi perpajakan modern dengan *administrative costs* yang dihitung dengan koefisien korelasi adalah 0,888. Hal ini menunjukkan terdapat hubungan yang sangat erat/sangat kuat antara penerapan sistem administrasi perpajakan modern dengan *administrative cost* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung. Arah hubungan yang negatif ditunjukkan dengan adanya tanda negatif pada angka 0,888, artinya semakin baik penerapan sistem administrasi perpajakan modern akan membuat *administrative cost* semakin menurun. Demikian pula sebaliknya, semakin buruk penerapan sistem administrasi perpajakan modern akan membuat *administrative costs* semakin meningkat.

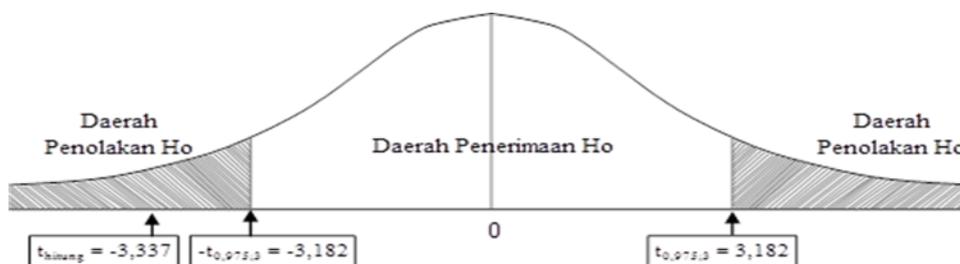
Selain itu, tingkat signifikansi koefisien korelasi satu sisi dari output (diukur dari probabilitas) menghasilkan angka 0.022 atau lebih kecil dari 0,05. Oleh karena nilai probabilitas lebih kecil dari 0.05, maka korelasi antara penerapan administrasi perpajakan modern dengan *administrative costs* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah kota Bandung adalah signifikan.

**Tabel 4.12**  
**Korelasi Antara Variabel Independent (X) dengan Variabel Dependent (Y)**

		Correlations	
		Administrative Cost	Modernisasi
Pearson Correlation	Administrative Cost	1.000	-.888
	Modernisasi	-.888	1.000
Sig. (1-tailed)	Administrative Cost	.	.022
	Modernisasi	.022	.
N	Administrative Cost	5	5
	Modernisasi	5	5

### 3) Uji Signifikansi

Melalui hasil perhitungan diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $-3,337$ , sementara pada tabel t dengan derajat tingkat kekeliruan 5% dan derajat bebas  $(5-2) = 3$  diperoleh nilai t tabel sebesar  $3,182$ . Karena  $t_{hitung}$  ( $-3,337$ ) lebih kecil dari negatif  $t_{tabel}$  ( $-3,182$ ), maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yaitu terdapat pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap *administrative costs* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung. Oleh karena itu, terbukti bahwa hasil pengujian adalah signifikan atau dengan kata lain penerapan sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh signifikan terhadap *administrative costs* Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung.



**Gambar 4.6**  
**Gratik Daerah Penerimaan dan Penolakan  $H_0$**

### 4) Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi sebesar 78,8% menunjukkan bahwa 78,8% perubahan pada *administrative costs* bisa dijelaskan atau dipengaruhi oleh penerapan sistem administrasi perpajakan modern pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 21,2% dipengaruhi variabel lain di luar variabel penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang diteliti.

Dari hasil semua perhitungan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern mempunyai korelasi yang sangat kuat terhadap administrative costs, ditunjukkan oleh angka hasil korelasi yaitu sebesar 0,888. Meskipun bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi administrative costs, tapi penerapan sistem administrasi perpajakan modern adalah faktor terkuat dari beberapa faktor yang mempengaruhi administrative costs karena pengaruh yang diberikan oleh penerapan sistem administrasi perpajakan modern lebih dari 50% yaitu 78,8 % sehingga sistem administrasi perpajakan modern merupakan faktor utama bila dibandingkan dengan faktor lain.

**5) Pengujian Asumsi Regresi**  
**a. Hasil Pengujian Asumsi Normalitas**

**Tabel 4.14**  
**Hasil Pengujian Asumsi Normalitas**

**Tests of Normality**

	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Unstandardized Residual	.243	5	.200*	.844	5	.177

\*. This is a lower bound of the true significance.  
 a. Lilliefors Significance Correction

Nilai probabilitas (sig.) yang diperoleh dari hasil uji Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,200 dan lebih besar dari tingkat kekeliruan 5% (0.05), sehingga dapat disimpulkan bahwa model regressi yang terbentuk berdistribusi normal.

**b. Hasil Pengujian Asumsi Heteroskedastisitas**

**Tabel 4.15**  
**Hasil Pengujian Asumsi Heteroskedastisitas**

**Correlations**

			absolut_error	Modernisasi
Spearman's rho	absolut_error	Correlation Coefficient	1.000	-.100
		Sig. (2-tailed)	.	.873
		N	5	5
Modernisasi	absolut_error	Correlation Coefficient	-.100	1.000
		Sig. (2-tailed)	.873	.
		N	5	5

Residual (error) yang muncul dari persamaan regressi mempunyai varians yang sama (tidak terjadi heteroskedastisitas), kesimpulan ini dibuat berdasarkan nilai signifikansi koefisien korelasi variabel bebas dengan nilai absolut error (0,873) masih lebih besar dari 0.05.

Karena hasil pengujian pada kedua asumsi regresi tidak terdapat pelanggaran, maka kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis regresi dapat dikatakan sudah valid karena sudah memenuhi syarat BLUE (best linear unbiased estimation), sehingga kesimpulan yang diperoleh dari hasil regresi dapat dianggap sudah menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

## **5. Kesimpulan Dan Saran**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap administrative costs pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah kota Bandung, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan sistem administrasi perpajakan modern pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang ada di wilayah Kota Bandung sudah termasuk baik, ini tercermin dari persentase total skor tanggapan responden yang termasuk dalam kriteria baik. Artinya penerapan sistem administrasi perpajakan modern, yang meliputi restrukturisasi organisasi, pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam penyempurnaan proses bisnis, penyempurnaan manajemen sumber daya manusia, serta pelaksanaan good governance secara keseluruhan sudah dilaksanakan dengan baik.
2. Biaya-biaya yang dikeluarkan kantor pelayanan pajak yang berada di wilayah kota Bandung untuk membiayai kegiatan mengadministrasikan pajak secara rata-rata sebesar Rp 94,581 untuk setiap wajib pajak. Tertinggi biaya administrasi dikeluarkan oleh kantor pelayanan pajak Bandung Cicadas yaitu sebesar Rp 112,861 untuk setiap wajib pajak. Terendah biaya administrasi dikeluarkan oleh kantor pelayanan pajak Bandung Karees yaitu sebesar Rp 57,381 untuk setiap wajib pajak.
3. Penerapan sistem administrasi perpajakan modern pada kantor pelayanan pajak yang ada di wilayah Kota Bandung berpengaruh signifikan terhadap administrative cost, dengan arah hubungan negatif. Artinya semakin baik penerapan sistem administrasi perpajakan modern akan menurunkan administrative cost. Sebaliknya, semakin buruk penerapan sistem administrasi perpajakan modern akan meningkatkan administrative cost. Sebesar 78,8% perubahan pada administrative

cost bisa dijelaskan atau dipengaruhi oleh penerapan sistem modernisasi perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah kota Bandung.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai bahan evaluasi antara lain:

1. Untuk meningkatkan manajemen sumber daya manusia yang masih kurang baik maka Direktorat Jenderal Pajak lebih meningkatkan competency mapping agar efektifitas dan akuntabilitas sistem manajemen sumber daya manusia dapat lebih baik.
2. Pelaksanaan good governance Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung sudah cukup baik, maka Direktorat Jenderal Pajak lebih meningkatkan pengawasan internal sehingga kode etik pegawai lebih tegas dan konsisten serta implementasi dan evaluasi dalam program modernisasi dapat berhasil sehingga tujuan perpajakan dapat tercapai.
3. Sistem administrasi perpajakan modern yang telah diterapkan dengan baik diharapkan lebih ditingkatkan lagi agar biaya yang di keluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dapat semakin berkurang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Jatmiko. 2008. *Pelatihan Metodologi penelitian Bagi Karyawan PT. Pos Indonesia*. Modul. Bandung.
- Damodar N. Gujarati. 2003. *“Basic Econometrics”* fourth edition McGraw-Hill. New York.
- Ely Suhayati dan Siti Kurnia Rahayu, 2008, *Pemeriksaan Pajak (Tax Audit)*, Bandung: Universitas Komputer Indonesia.
- Erly Suandy. 2006. *Hukum Pajak*. Jakarta. PT Elex Media Komputindo.
- Jonathan Sarwono. 2005. *Riset Pemasaran dengan SPSS*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Liberti Pandiangan. 2007. *Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan*. Jakarta: PT ELEX Media Komputindo.
- Marcus Taufan Sofyan. 2005. *Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Skripsi. Jakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Perpajakan*. Jakarta. PT Elex Media Komputindo.

- Mulyadi. 2007. *Akuntansi Biaya*. Edisi Lima, UUP. STIM. YKPM.
- Singgih Santoso. 2002. *Mengolah Data Statistik Secara Profesional*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Siti Kurnia Rahayu. 2009. *Perpajakan Indonesia “Konsep dan Aspek Formal”*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Siti Resmi. 2007. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Dua. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Suparman. 2007. *Catatan Praktek Perpajakan Kita*.
- Umi Narimawati. 2007. *Riset Manajemen Sumber Daya Manusia: Aplikasi Contoh dan Perhitungannya*. Jakarta: Agung Media.
- Waluyo. 2007. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo dan Wirawan B Ilyas, 2003, *Penyesuaian Dengan Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan*, Jakarta: Salemba Empat.

ISSN 2086-0447



9 772086 045558